BAB II

Gambaran Umum Perusahaan

2.1 Sejarah Perusahaan

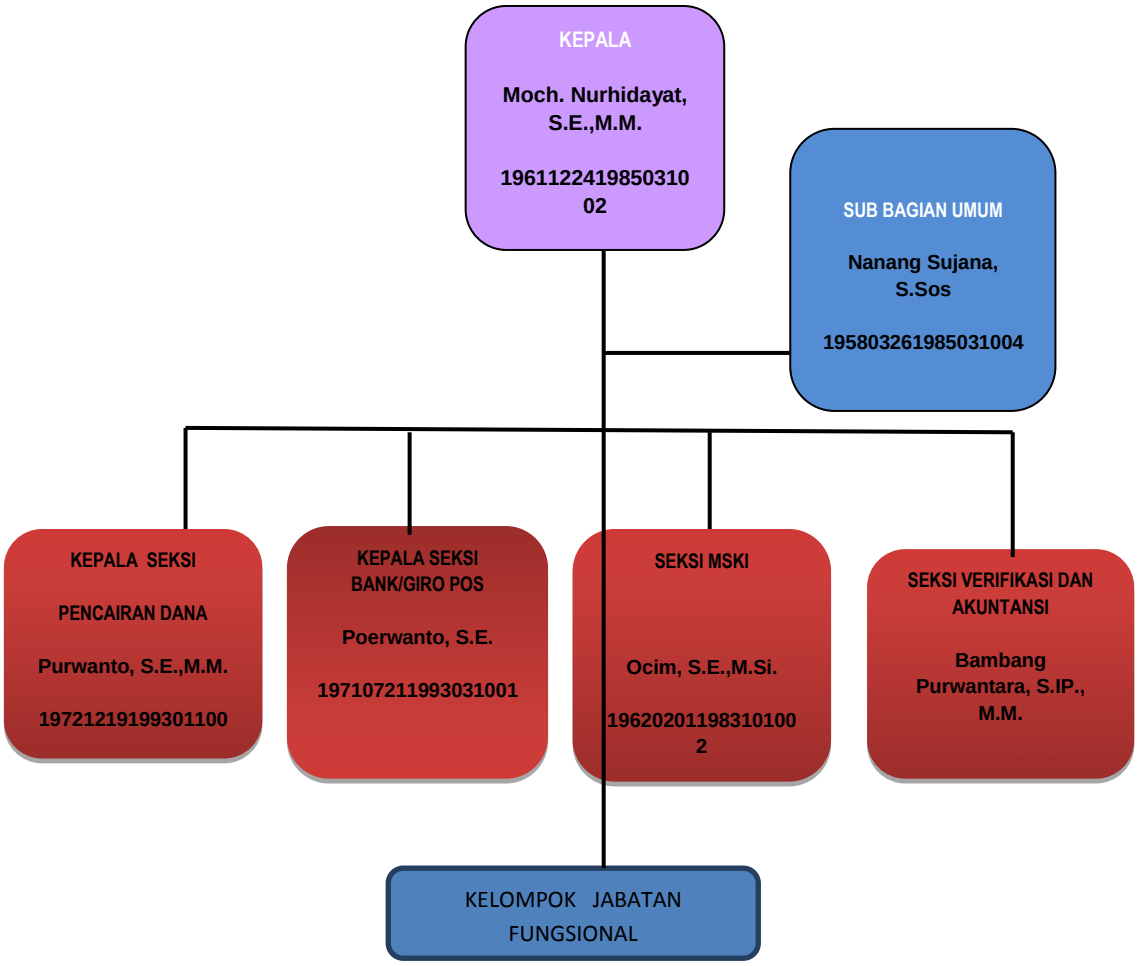
Awal pembentukan KPPN Bandung I dimulai pada tahun 1965 berdasarkan Keputusan Menteri Urusan Pendapatan,Pembiayaan, dan Pengawasan Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1964 Nomor PKN/1/6/4 dan mulai beroperasi pada Januari 1965 dengan nomenklatur pada saat itu yaitu Kantor Pusat Perbendaharaan Negara Dalam sejarah perjalanannya sejak Januari 1965 sampai saat ini KPPN Bandung I telah mengalami beberapa kali perubahan nomenklatur mulai dengan Kantor Pusat Perbendaharaan Negara, kemudian pada tahun 1968 berubah menjadi Kantor Bendahara Negara, selanjutnya pada tahun 1975 berubah lagi menjadi Kantor Perbendaharaan Negara pada tahun 1990 berubah lagi menjadi Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara sekaligus memisahkan KPKN Bandung I dan KPKN Bandung II berdasarkan Keputusan Menteri Keuangantanggal 12 Juni 1989 nomor.645/KMK.01/1989.

Sejalan dengan pengembangan Organisasi pada Tahun 2002 KPKN Bandung II bergabung dengan KPKN Bandung I dan menjadi KPKN Bandung. Pada tahun 2004 KPKN berubah lagi nomenklaturny KPPN Bandung. Kemudia untuk lebih meningatkan mutu pelayanan kepada masyarakat berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor.214/KMK.01/2005

tanggal 2 Mei 2005 KPPN Bandung pecah menjadi KPPN Bandung I dan KPPN Bandung II. Berikut urutan Kepala KPPN Bandung I berdasar urutan tahun kepemimpinan

2.2 Struktur Organisasi Perusahaan .

KPPN Bandung I adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, struktur organisasi disusun sebagai berikut .



Gamabar 2.1

Struktur Organisasi kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung 1

1.3 Uraian Tugas Perusahaan.

1. Melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara.
2. Penyaluran pembiayaan atas beban APBN.
3. Melakukan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

2.4 Kegiatan Perusahaan.

Kegiatan dari Instansi KPPN Bandung 1 adalah :

1. Pengujian terhadap dokumen surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan perundang- undangan

2. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana dari Kas Negara atas nama Menteri Keuangan (Bendahara Umum Negara)

3. Penyaluran Pembiayaan atas beban APBN

4. Penilaian dan pengesahan terhadap penggunaan uang yang telah disalurkan 11

5. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran Negara melalui dan dari Kas Negara

6. Pengiriman dan penerimaan kiriman uang;

7. Penyusunan Laporan Pelaksanaan APBN;

8. Penyusunan Laporan Realisasi pembiayaan yang berasal dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri;

9. Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;

10. Penyelenggaraan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi;

11. Pembuatan tanggapan dan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan;

12. Pelaksanaan kehumasan

13. Pelaksanaan admini